

**DETERMINAN TINGKAT PENDIDIKAN PEREMPUAN  
DI JAWA BARAT: PENGARUH KONDISI EKONOMI  
ATAU KEBIJAKAN DISKRIMINATIF?**

**TESIS**



Oleh

Sri Mulyati

8061801001

Pembimbing I:

Dr. Rulyusa Pratikto, S.AB., M.S.E

Pembimbing II:

Indraswari, M.A., Ph.D

**PROGRAM MAGISTER ILMU SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG**

**2021**

**DETERMINAN TINGKAT PENDIDIKAN PEREMPUAN  
DI JAWA BARAT: PENGARUH KONDISI EKONOMI  
ATAU KEBIJAKAN DISKRIMINATIF?**



**Oleh:**

**Sri Mulyati**

**8061801001**

**Persetujuan Untuk Sidang Tesis pada Hari/Tanggal:  
Senin, 02 Agustus 2021**

**Pembimbing I:**

**Dr. Rulyusa Pratikto, S.AB., M.S.E**

**Pembimbing II:**

**Indraswari, M.A., Ph.D**

**PROGRAM MAGISTER ILMU SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG**

**JULI 202**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Mulyati  
NPM : 8061801001  
Program Studi : Magister Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung

Menyatakan bahwa tesis dengan judul

**“DETERMINAN TINGKAT PENDIDIKAN PEREMPUAN DI JAWA  
BARAT: PENGARUH KONDISI EKONOMI ATAU KEBIJAKAN  
DISKRIMINATIF?”**

adalah benar-benar karya saya di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau tuntutan formal atau non-formal dari pihak lain yang berkaitan dengan karya saya, saya siap menanggung segala risiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : 2 Februari 2021



**Sri Mulyati**

**DETERMINAN TINGKAT PENDIDIKAN PEREMPUAN  
DI JAWA BARAT: PENGARUH EKONOMI ATAU KEBIJAKAN  
DISKRIMINATIF?**

**Sri Mulyati (8061801001)**

**Pembimbing 1: Dr. Rulyusa Pratikto, S.AB., M.S.E**

**Pembimbing 2: Indraswari, MA, Ph.D**

**Magister Ilmu Sosial**

**Bandung**

**Agustus 2021**

**Abstrak**

Berbagai studi memperlihatkan jika terjadi gangguan ekonomi keluarga, maka rumah tangga miskin pada umumnya akan memilih prioritas pengeluaran dan mengorbankan pengeluaran lainnya, salah satunya adalah pengeluaran pendidikan anak perempuan memiliki kecenderungan untuk dikorbankan. Di sisi lain munculnya kebijakan diskriminatif mengancam partisipasi pendidikan perempuan menjadi semakin rendah akibat diskriminasi, kekerasan dan stigma yang mereka alami di institusi pendidikan. Hal inilah yang diduga menyebabkan mengapa partisipasi pendidikan perempuan di Jawa Barat masih relatif rendah dibandingkan dengan laki-laki. Untuk membandingkan faktor yang paling memengaruhi di antara kebijakan diskriminatif dan ekonomi terhadap pendidikan perempuan, maka digunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan model regresi data panel untuk menganalisis faktor yang paling signifikan pengaruhnya terhadap pendidikan perempuan dan penelitian kualitatif melalui analisis isi untuk mengukur lokus diskriminasi pada muatan/substansi isi dan dampak dari kebijakan tersebut. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan; a) kebijakan diskriminatif dari sisi muatan (isi) dan dampaknya menghambat hak perempuan atas pendidikan. b) kebijakan diskriminatif dan variabel ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perempuan pada tingkat pendidikan dasar (SD-SMP/ $y_1$ ) dan SMA ( $y_2$ ). c) pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pendidikan perempuan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, namun tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pendidikan tinggi. d) variabel ekonomi dan kebijakan diskriminatif tidak berpengaruh terhadap pendidikan perempuan pada tingkat pendidikan tinggi sehingga diduga ada faktor lain yang memengaruhinya. e) kebijakan diskriminatif merupakan faktor yang paling signifikan memengaruhi pendidikan perempuan pada tingkat menengah (SMA), sedangkan pendapatan kabupaten/kota merupakan faktor yang paling signifikan memengaruhi pendidikan perempuan pada tingkat dasar (SD-SMP). Pemerintah dan masyarakat perlu melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan memulihkan perempuan korban yang menjadi korban akibat pemberlakuan kebijakan diskriminatif. Juga perlu melakukan kajian lanjutan untuk melihat faktor lain yang memengaruhi pendidikan perempuan pada tingkat pendidikan tinggi.

*Keyword : kebijakan diskriminatif, ekonomi, tingkat pendidikan perempuan*

## **DETERMINANTS OF WOMEN'S EDUCATION LEVEL IN WEST JAVA: ECONOMIC OR DISCRIMINATIVE POLICIES EFFECT?**

**Sri Mulyati (8061801001)**

**First Supervisor: Dr Rulyusa Pratikto, S.AB., M.S.E**

**Second Supervisor: Indraswari, MA, Ph.D**

**Magister of Social Science**

**Bandung**

**Agutsus 2021**

### **Abstract**

Various studies have shown that if there is a family economic disruption, poor households will have to choose their priority expenses and sacrifices the others, one of them is that girls' education expenses that tend to be sacrificed. On the other hand, the emergence of discriminatory policies threatens to reduce women's educational participation due to the discrimination, violence and stigma they experienced in educational institutions. This thought is the reason why women's education participation in Indonesia is still relatively low compared to men. To compare the most influential factors between discriminatory and economic policies on women's education, quantitative and qualitative research methods are used. Quantitative research was conducted using a panel data regression model to analyze the most significant factors and qualitative research through content analysis is to measure the locus of discrimination in the content and impact of the policy. From the results of the analysis, it can conclude that; a) discriminatory policies in terms of content and caused barriers to women's rights for education. b) discriminatory policies and economic variables have a significant influence on women at the basic education level (elementary school-middle school/y1) and high school (y2). c) Regional income and expenditure have a significant effect on women's education at the primary and secondary education levels, but have no effect on higher education levels. d) Economic and discriminatory policies variables have no effect on women's education at the higher education level so it is suspected that there are other factors that influence it. e) Discriminatory policies are the most significant factor affecting women's education at the secondary level (SMA), while regional income is the most significant factor affecting women's education at the elementary level (SD-SMA). The government and society need to make various efforts to protect and restore women victims who are victims of the implementation of discriminatory policies. It is also necessary to conduct further studies to see other factors that affect women's education at the higher education level.

*Keywords : discriminatory policy, economy, women's education level*



## **KATA PENGANTAR**

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah dan kesempatan memberikan daya nalar kritis untuk menuliskan semua pengetahuan dan pengalaman saya sebagai perempuan, sebagai muslimah, sebagai warga Jawa Barat, kerja panjang di gerakan perempuan dan sebagai mahasiswa yang diberikan banyak ruang untuk mengeksplorasi berbagai ide maupun gagasan. Dari proses diskusi dan refleksi bersama dengan pengajar, pembimbing dan penguji tesis di pascasarjana Magister Ilmu Sosial studi pembangunan sehingga menghasilkan karya tulis (tesis) yang berjudul **“DETERMINAN TINGKAT PENDIDIKAN PEREMPUAN DI JAWA BARAT: PENGARUH EKONOMI ATAU KEBIJAKAN DISKRIMINATIF?”**

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini tidaklah sempurna, namun dalam karya ini penulis berusaha menyampaikan gagasan bahwa isu perempuan terutama kesenjangan gender di sektor pendidikan tidaklah dipengaruhi faktor tunggal tapi terkait dengan berbagai faktor ekonomi makro maupun mikro juga terkait dengan berbagai kebijakan di tingkat daerah maupun nasional yang saling terhubung satu sama lain. Ada beberapa pihak yang berkontribusi besar sehingga bisa menyelesaikan karya tulis ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr Rulyusa Pratikto, S.AB., M.S.E dan Ibu Indraswari, MA,Ph.D selaku pembimbing dan teman diskusi yang sudah mengarahkan penulis serta memberikan banyak kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki agar menjadi karya akademik yang bisa di pertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi positif terhadap dunia

akademisi maupun dalam upaya membangun masyarakat serta kebijakan yang lebih toleran, setara dan berkeadilan terutama di Jawa Barat.

2. Bapak Sanerya Hendrawan, Ph.D. dan bapak Gandhi Pawitan, Ir.,M.Sc.,Ph.D. selaku Penguji yang telah memberikan masukan, pandangan dan catatan kritis sehingga seluruh pemikiran dalam karya tulis bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan membantu bagaimana menyajikan data serta fakta yang objektif dengan mensinergikan pengetahuan secara akademik dan pengalaman sebagai praktisi gerakan perempuan.
3. Seluruh pengajar dan pimpinan di program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, penulis haturkan banyak terima kasih yang telah memberikan ruang yang sebesarnya-besarnya untuk belajar dan mengembangkan kreatifitas serta inovasi dalam berbagai penelitian dan program pengabdian masyarakat. Sehingga banyak hasil riset dan program pemberdayaan masyarakat yang berkontribusi untuk memperkuat pengetahuan dan pengalaman penulis menjadi luas dan beragam. Bapak/Ibu menjadi partner, teman diskusi dan keluarga besar yang sangat menyenangkan.
4. Keluarga besar Sapa Institut dan Bale istri, yang menjadi tempat semua proses ini bermula dan selalu menjadi laboratorium pengetahuan serta pengalaman. Bersama mereka penulis terus mengeksplorasi berbagai ide, gagasan dan praktik cerdas dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih adil gender.
5. Keluarga besar Jaringan Advokasi Jawa barat (JAJ), Komnas Perempuan, WCC Pasundan Durebang dan JAKATARUB yang berbagai kajian dan gerakannya telah menjadi inspirasi karya tulis ini serta selalu menjadi teman



untuk berbagi. Mereka telah membangun kesadaran dan pengetahuan penulis bahwa praktik diskriminasi yang terlembagakan telah berdampak buruk terhadap berbagai kelompok rentan, bersama mereka penulis menemukan titik temu antara isu perempuan dan keberagaman serta bagaimana membangun solidaritas (kekeluargaan) antar sesama tanpa memandang suku, ras, agama dan jenis kelamin.

6. Teman-teman satu angkatan di Magister Ilmu sosial (Disa, Yustina, Dewi, Amin, Jefri) yang menjadi teman dan sahabat berbagi serta saling menguatkan dan memberikan motivasi, walaupun pertemuan kita singkat tetapi amat berkesan, bagaimana kita membangun solidaritas sebagai sahabat. Juga untuk sahabat sekelasku dan sahabat di gerakan, terima kasih untuk selalu saling mendukung. Hingga kita sama-sama bisa menyelesaikan studi.
7. Keluarga tercintaku, partner hidupku dan sekaligus partner kerjaku (Ridwan Apandi) yang selalu memberikan dukungan dan juga kebebasan dalam mengambil keputusan serta bersama kita selalu menemukan berbagai ide dan gagasan baru. Anak-anakku: Aliya, Ikrar dan Diandra yang selalu mengerti dan memahami aktivitas ibunya, mereka menjadi spirit untuk terus membangun kehidupan yang lebih baik.
8. Keluarga besar saya ibu, Mimi, kakak dan saudara-saudaraku di Ebah dan Majalengka, terima kasih telah memberikan dukungan, pengertiannya dan ruang bagi penulis untuk terus berkembang dan berkeaktivitas sebagai perempuan, yang mungkin tidak semua perempuan bisa mendapatkannya.

9. Teman-teman di Forum Pengada Layanan (FPL) bagi Perempuan Korban Kekerasan, terima kasih telah memberikan saya banyak pengalaman, pengetahuan, sahabat dari Sabang sampai Merauke serta belajar mengelola beragam pengetahuan dan pengalaman.

Karya tulis ini masih memiliki kekurangan yang memerlukan kajian lebih lanjut untuk menyempurnakan apa yang ditemukan dari hasil penelitian ini. Semoga karya ini bisa bermanfaat secara akademik maupun secara praktisi bisa digunakan sebagai bahan untuk memperkuat edukasi terhadap publik dan meningkatkan kebijakan serta program mengatasi kesenjangan pendidikan perempuan di Jawa Barat.

Bandung, 12 Agustus 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

**SURAT PERSETUJUAN**

**SURAT PERNYATAAN**

**ABSTRAK**

**ABSTRACT**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	3
1.3 Fokus Penelitian .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Kegunaan Penelitian.....	9
1.6 Keterbatasan Penelitian .....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II STUDI PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Atas Ketidakadilan Gender, Kebijakan Diskriminatif dan Hak- hak Konstitusional .....	11
2.2 Pengaruh Kondisi Ekonomi Terhadap Pendidikan Perempuan .....	26
2.3 Kebijakan Diskriminatif, Kondisi Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Perempuan Sebuah Tinjauan .....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	33
3.2 Model dan Metode Penelitian.....	35
3.3 Operational Variabel dan Sumber Data .....	39
<b>BAB IV KONDISI OBJEKTIF JAWA BARAT .....</b>	<b>42</b>
4.1 Profil Demografi Jawa Barat .....	42
4.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi Penduduk Jawa Barat .....	46
4.3 Perkembangan Kebijakan Diskriminatif di Jawa Barat .....	52
<b>BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
5.1 Pengaruh Variabel ekonomi dan Kebijakan Diskriminatif Terhadap Tingkat Pendidikan Perempuan di Jawa Barat .....	55
5.1.1 Uji Asumsi Klasik.....	56

5.1.1.1 Hasil Uji Normalitas Data .....	56
5.1.1.2 Pengujian Autokorelasi .....	59
5.1.1.4 Pengujian Multikolinearitas .....	63
5.1.1.5 Pemilihan Metode Estimasi.....	64
5.1.2 Uji Hipotesis .....	71
5.1.2.1 Persamaan Regresi Data Panel .....	69
5.1.2.2 Uji t.....	70
5.1.2.3 Uji F.....	73
<b>5.2 Analisis Isi Kebijakan Diskriminatif di Jawa Barat .....</b>	<b>89</b>
5.2.1 Pengurangan Hak atas Pendidikan Akibat Kebijakan yang Mengatur Pemakaian Busana .....	100
5.2.2 Pengurangan Hak Atas Pendidikan Karena Kebijakan Pelarangan Prostitusi dan Pengaturan Jam Malam yang Menyebabkan Kriminalisasi terhadap Perempuan 109	
5.2.3 Pengurangan Hak atas Pendidikan Akibat Kebijakan yang Membatasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan .....	117
5.2.4 Pengurangan Hak atas Pendidikan Karena Kebijakan Daerah Atas Nama Moralitas dan Agama.....	125
<b>5.3 Pengaruh Signifikan Faktor Ekonomi dan Kebijakan Diskriminatif terhadap Tingkat Pendidikan Perempuan .....</b>	<b>132</b>
5.3.1 Kebijakan Diskriminatif Dari Sisi Muatan (Isi) dan Dampaknya Berpengaruh terhadap Pengurangan Hak Perempuan atas Pendidikan .....	132
5.3.2 Kebijakan Diskriminatif Memiliki Pengaruh Yang Signifikan dalam Menghambat Perempuan untuk Mencapai Pendidikan Dasar (SD-SMP/ $Y_1$ ) dan SMA ( $Y_2$ ).....	136
5.3.3 Variabel Ekonomi Memengaruhi Tingkat Pendidikan Perempuan pada Jenjang Pendidikan Dasar (SD-SMP/ $Y_1$ ) dan Menengah (SMA/ $Y_2$ ).....	138
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>147</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>153</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1: Tingkat Pendidikan di Indonesia Tahun 2015 .....	4
Tabel 1. 2: Kebijakan Diskriminatif dan Tingkat Pendidikan Perempuan.....	7
Tabel 1. 3: Tingkat Pendidikan, Inflasi dan Kebijakan Diskriminatif Jawa Barat .....	8
Tabel 2. 1: Penjelasan Tahapan Pengujian .....	17
Tabel 2. 2: Model Penelitian yang Dikembangkan.....	32
Tabel 3. 1: Operasionalisasi Variabel.....	40
Tabel 4. 1: Jumlah Penduduk Jawa Barat Tahun 2019 Berdasarkan Agama .....	46
Tabel 4. 2: Pengeluaran Perkapita Perempuan dan Laki-Laki Jawa Barat.....	48
Tabel 4. 3: Angka Partisipasi Sekolah.....	49
Tabel 4. 4: IPM Laki-laki dan Perempuan Jawa Barat Tahun 2019 .....	50
Tabel 4. 5: Komponen Indeks Pemberdayaan Gender Jawa Barat .....	52
Tabel 4. 6: 12 Provinsi Terbanyak Kebijakan Diskriminatif Tahun 1999-2019 .....	53
Tabel 4. 7: Jumlah Kebijakan Diskriminatif di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ....	54
Tabel 5. 1: Hasil Uji Normalitas .....	57
Tabel 5. 2: Hasil Uji Autokorelasi.....	60
Tabel 5. 3: Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	62
Tabel 5. 4: Hasil Uji Multikolinearitas .....	63
Tabel 5. 5: Hasil Estimasi Uji Chow .....	65
Tabel 5. 6: Hasil Estimasi Uji Hausman.....	67
Tabel 5. 7: Hasil Estimasi Uji Lagrange Multiplier (LM) .....	69
Tabel 5. 8: Rekapitulasi Hasil Uji Asumsi Klasik dan Hasil Estimasi.....	71
Tabel 5. 9: Hasil Estimasi Regresi (Perempuan) .....	72
Tabel 5. 10: Hasil Uji t (Perempuan).....	70
Tabel 5. 11: Hasil Uji F (Perempuan) .....	74
Tabel 5. 12: Kebijakan Diskriminatif di Jawa Barat Tahun 1999-2019.....	90
Tabel 5. 13: Jumlah Kebijakan Diskriminatif di Jawa Barat Berdasarkan Kategorisasi ...	98
Tabel 5. 14: Pengujian Landasan Prinsip Non Diskriminasi, Kesetaraan Substantif dan Tanggung Jawab Negara .....	101
Tabel 5. 15: Pengujian Kriteria Keadilan, Yuridis dan Substantif .....	102
Tabel 5. 16: Daftar kebijakan dan Dampaknya .....	104
Tabel 5. 17: Pengujian Landasan Prinsip non Diskriminasi, Kesetaraan Substantif dan Tanggung Jawab Negara .....	111
Tabel 5. 18: Pengujian Kriteria Keadilan, Yuridis dan Substantif .....	112
Tabel 5. 19: Pengujian Landasan Prinsip non Diskriminasi, Kesetaraan Substantif dan Tanggung Jawab Negara .....	118
Tabel 5. 20: Pengujian Kriteria Keadilan, Yuridis dan Substantif .....	118
Tabel 5. 21: Pengujian Landasan Prinsip non Diskriminasi, Kesetaraan Substantif dan Tanggung Jawab Negara .....	126
Tabel 5. 22: Pengujian Kriteria Keadilan, Yuridis dan Substantif .....	126
Tabel 5. 23: Dampak Kebijakan Diskriminatif.....	133

## DAFTAR ISTILAH

<i>Bias gender</i>	Suatu kondisi yang memihak dan merugikan salah satu jenis kelamin.
<i>Budaya patriarki</i>	Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
<i>Diskriminasi</i>	sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu
<i>Gender</i>	pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
<i>Hak konstitusional</i>	sebuah hak yang dimiliki oleh warga negara dan diatur di dalam konstitusi UUD 1945.
<i>Kebijakan afirmasi</i>	kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok atau golongan tertentu (jender) memperoleh peluang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama.
<i>Kebijakan diskriminatif</i>	Kebijakan yang memuat unsur-unsur diskriminasi baik di tahap perumusan, muatan maupun implementasinya.
<i>Kelompok rentan</i>	Semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak.
<i>Kesetaraan gender</i>	Suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki sama-sama menikmati status, kondisi, atau kedudukan yang setara sehingga terwujud secara penuh hak-hak dan potensinya bagi pembangunan di segala aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
<i>Kesetaraan substantif</i>	Kesetaraan yang orientasinya adalah pada hasil, maka tindakan-tindakan afirmatif dianjurkan untuk dilakukan.

<i>Marginalisasi</i>	Proses pemutusan hubungan kelompok-kelompok dengan lembaga sosial utama, seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya.
<i>Peran ganda</i>	Bagian dari beban ganda yaitu pemaksaan atau pengabaian beban aktifitas berlebihan yang disebabkan pembakuan peran produktif-reproduktif untuk laki-laki dan perempuan yang kemudian berdampak pada pembagian kerja berlipat.
<i>Stereotype</i>	Pelabelan terhadap kelompok suku bangsa tertentu yang selalu berkonotasi negatif sehingga sering merugikan dan timbul ketidakadilan.
<i>Stigma</i>	Ciri negatif yang menempel pada diri seseorang karena pengaruh lingkungannya.
<i>Subordinasi</i>	Penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain.
<i>Ketidakadilan gender</i>	Berbagai tindak keadilan atau diskriminasi yang bersumber pada keyakinan gender.
<i>Inflasi</i>	Keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang.
<i>Pertumbuhan ekonomi</i>	Sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.
<i>Tingkat pendidikan perempuan</i>	Partisipasi perempuan pada jenjang pendidikan tertentu
<i>Pendidikan dasar</i>	Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak.
<i>Pendidikan menengah</i>	Jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar.
<i>Pendidikan tinggi</i>	Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah. Mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan profesi, serta spesialis.

<i>Variabel ekonomi</i>	Setiap pengukuran yang membantu menentukan bagaimana suatu ekonomi berfungsi.
<i>Kekerasan</i>	Suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan.
<i>Regresi data panel</i>	Gabungan antara data cross section dan data time series, dimana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda.
<i>Kriteria yuridis</i>	Sebuah kriteria legal yang harus dipenuhi format teknis sebuah kebijakan.
<i>Kriteria keadilan</i>	Kebaikan dalam arti harmoni dan perimbangan dari dalam, yang tidak dapat diketahui atau diterangkan dengan argumentasi.
<i>Kriteria substantif</i>	kriteria materi sebuah kebijakan dimana mencakup kesesuaian isi dengan tujuan pengaturan yang menjadi kebijakan, kejelasan subjek dan objek pengaturan, kejelasan prosedur dan birokrasi, dan kedayagunaan dan kehasilgunaan.
<i>Kesetaraan substantif</i>	Kesetaraan yang orientasinya adalah pada hasil, maka tindakan-tindakan afirmatif dianjurkan untuk dilakukan
<i>Tingkat Kemiskinan</i>	suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah
<i>Sumbangan Pendapatan Perempuan</i>	Sejumlah penghasilan yang digunakan oleh perempuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu
<i>Pengeluaran perkapita perempuan</i>	rata-rata pengeluaran setiap penduduk perempuan dalam suatu wilayah yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan (2017:2-6) dari tahun 1999-2016 ada 426 kebijakan di tingkat daerah dan nasional yang mendiskriminasi perempuan, minoritas agama dan kelompok rentan lainnya. Setara Institut (2019:55) menemukan dari 28 kasus diskriminatif yang terdokumentasikan di Jawa Barat ditemukan 54 praktik pelayanan diskriminatif yang terbagi dalam 30 diskriminasi di sektor pelayanan administrasi dan 24 di sektor pelayanan jasa. Salah satu dampaknya menyebabkan kelompok rentan perempuan, anak dan minoritas agama kehilangan hak untuk menikmati hak konstitusional atas layanan dasar pendidikan, kesehatan dan pengakuan sebagai warga negara Indonesia. Sebagaimana temuan dari Jaringan Advokasi Jabar (2017:10) yang menegaskan bahwa kebijakan diskriminatif mengenai aturan cara berpakaian yang harus sesuai dengan ajaran agama tertentu dan jam malam yang diterapkan di institusi pendidikan menyebabkan perempuan mengalami stigma dan membatasi ruang gerak perempuan, sehingga mengancam semakin banyak anak perempuan yang akan mengalami putus sekolah baik di tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi.

Persoalan lainnya yang juga ikut memengaruhi tingkat pendidikan perempuan adalah kondisi ekonomi, sebagaimana pendapat Kharisma (2017) bahwa dalam berbagai penelitian, umumnya rumah tangga di pedesaan dalam upaya mengantisipasi krisis ekonomi cenderung mengurangi investasi pendidikan

anak berusia muda untuk melindungi pendidikan anak yang berusia lebih tua. Lebih lanjut, Kharisma (2017) menegaskan bahwa anak perempuan di Indonesia cenderung memiliki kemungkinan putus sekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, yang disebabkan faktor pertimbangan prioritas bahwa nilai ekonomi atau tingkat pengembalian anak laki-laki dianggap lebih tinggi dibandingkan perempuan. Di sisi lain, hasil analisis terhadap data Susenas dan *Indonesia Family Lives Survey (IFLS)* diduga ada beberapa faktor ekonomi yang bisa memengaruhi tingkat pendidikan anak, yaitu: tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran untuk makanan, pakaian, rokok, pendidikan dan transportasi, jenis pekerjaan dan sumber penghasilan orang tua, tingkat konsumsi sandang pangan, serta akses terhadap layanan keuangan.

Hasil penelitian di atas diperkuat oleh temuan awal Elisabeth, Pratikto dan Mulyati (2019) yang memberikan bukti secara empiris bahwa inflasi terutama inflasi makanan memiliki dampak negatif terhadap tingkat pendidikan anak perempuan terutama pada rumah tangga miskin di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan inflasi cenderung menggerus daya beli masyarakat pada rumah tangga miskin yang juga dipengaruhi masih kuatnya budaya patriarki, maka jika rumah tangga mengalami gangguan ekonomi yang dihadapkan pada kondisi yang menyebabkan mereka harus memilih antara prioritas pendidikan anak, maka pendidikan anak laki-laki akan lebih diutamakan daripada pendidikan anak perempuan. Temuan awal ini diperkuat oleh Elisabeth, Pratikto, Mulyati (2019) dan Mulyati, Pawitan (2019) yang melakukan analisa terhadap data Badan Pusat Statistik tahun 2015 dan 2019 yang memperlihatkan bahwa inflasi hanya

berpengaruh terhadap Harapan Lama Sekolah Perempuan, sedangkan Harapan Lama Sekolah Laki-laki sama sekali tidak dipengaruhi oleh inflasi. Bahkan, data memperlihatkan bahwa kenaikan 1% inflasi akan menyebabkan perempuan kehilangan hampir satu tahun harapan untuk melanjutkan pendidikannya.

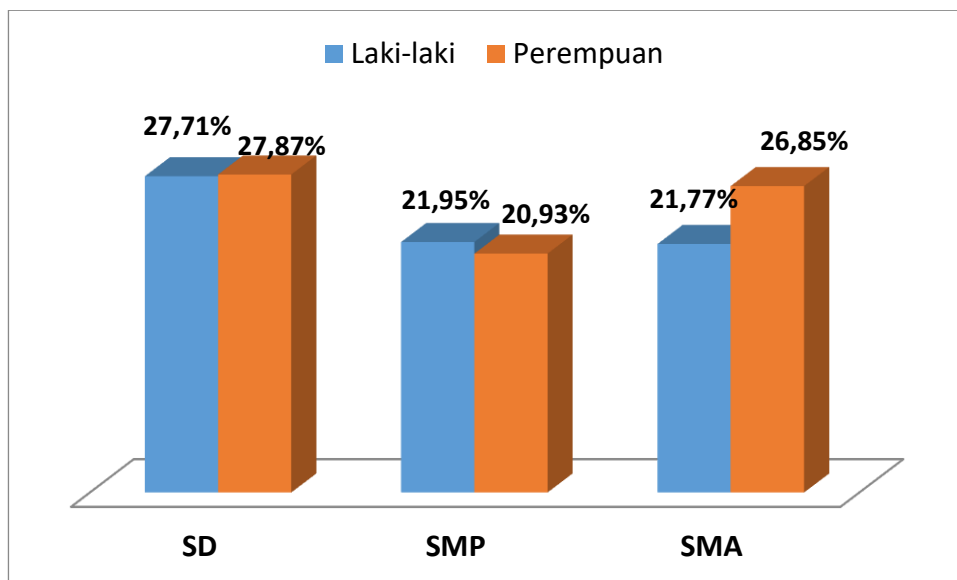
Temuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jaringan Advokasi Jabar (2018) dan PSHK (2017) memperkuat dugaan di atas bahwa yang menghambat akses pendidikan bagi perempuan adalah faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang rendah, kemudian semakin diperparah dengan munculnya berbagai kebijakan diskriminatif yang menyebabkan perempuan terhambat dalam mengakses pendidikan. Dengan demikian, kemunculan kebijakan diskriminatif dan gangguan kondisi ekonomi yang diduga akan menyebabkan perempuan semakin rentan mengalami putus sekolah dan dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan tingkat pendidikan perempuan semakin rendah.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Data BPS tahun 2015 memperlihatkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikannya maka semakin berkurang tingkat partisipasi perempuan. Dalam tabel di bawah ini memperlihatkan pada jenjang pendidikan SD, perempuan lebih tinggi yaitu 27,87% sedangkan laki-laki 27,71%. Akan tetapi, data menunjukkan penurunan pada jenjang SMP yaitu perempuan 20,93% dan jumlah laki-laki 21,95%. Perbedaan jumlah yang signifikan terlihat dari jumlah perempuan yang menamatkan pendidikan sampai SMA 21,77 % dan laki-laki lebih besar jumlahnya yaitu 26,85%. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah perempuan yang

berhasil menamatkan pendidikan sampai SMA tetap jauh tertinggal dari laki-laki yaitu 27,95% dan perempuan 22,25 %.

**Tabel 1. 1: Tingkat Pendidikan di Indonesia Tahun 2015**



Sumber Badan Pusat Statistik (BPS)

Masih terjadinya kesenjangan pendidikan perempuan dan laki-laki tidak serta merta dijawab oleh pemerintah daerah dengan melahirkan beberapa kebijakan afirmasi yang bisa menghindarkan anak perempuan mengalami *drop out* ketika terjadi gangguan ekonomi. Bahkan, yang terjadi adalah pemerintah daerah mengeluarkan berbagai kebijakan yang membatasi ruang gerak bahkan mendiskriminasi perempuan. Kondisi ini berbeda dengan UUD Negara RI 1945 yang menyiratkan prinsip non-diskriminatif melalui pernyataan komitmen negara Indonesia untuk melindungi setiap warga negaranya dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun (Pasal 28I (2)) dan hak warga negara untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H (2)).

Komitmen negara Republik Indonesia untuk menghapuskan diskriminasi diperkuat dengan penerbitan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang melarang perbedaan, pengabaian, atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang menyebabkan, memengaruhi atau bertujuan mengurangi ataupun meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apa pun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam tata kelola pemerintahan Republik Indonesia seharusnya kebijakan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi atau kebijakan yang sudah lahir di tahun sebelumnya, namun dalam kenyataannya menurut hasil pemantauan Komnas Perempuan berbagai kebijakan diskriminatif ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2010:15) mengklasifikasikan kebijakan diskriminatif menjadi 4 kelompok yaitu; kriminalisasi terhadap perempuan, kontrol tubuh perempuan, pembatasan kebebasan hak beragama dan tenaga kerja. Dari keempat klasifikasi di atas perempuan yang paling terkena dampak negatif dari keberadaan kebijakan diskriminatif itu.

Hasil studi dari Jaringan Advokasi Jawa Barat (2018) tentang dampak implementasi Perda Tata Nilai No. 7 Tahun 2014 Kota Tasikmalaya terutama terkait pasal 14 yang mengatur etika berpakaian menyebabkan beberapa sekolah

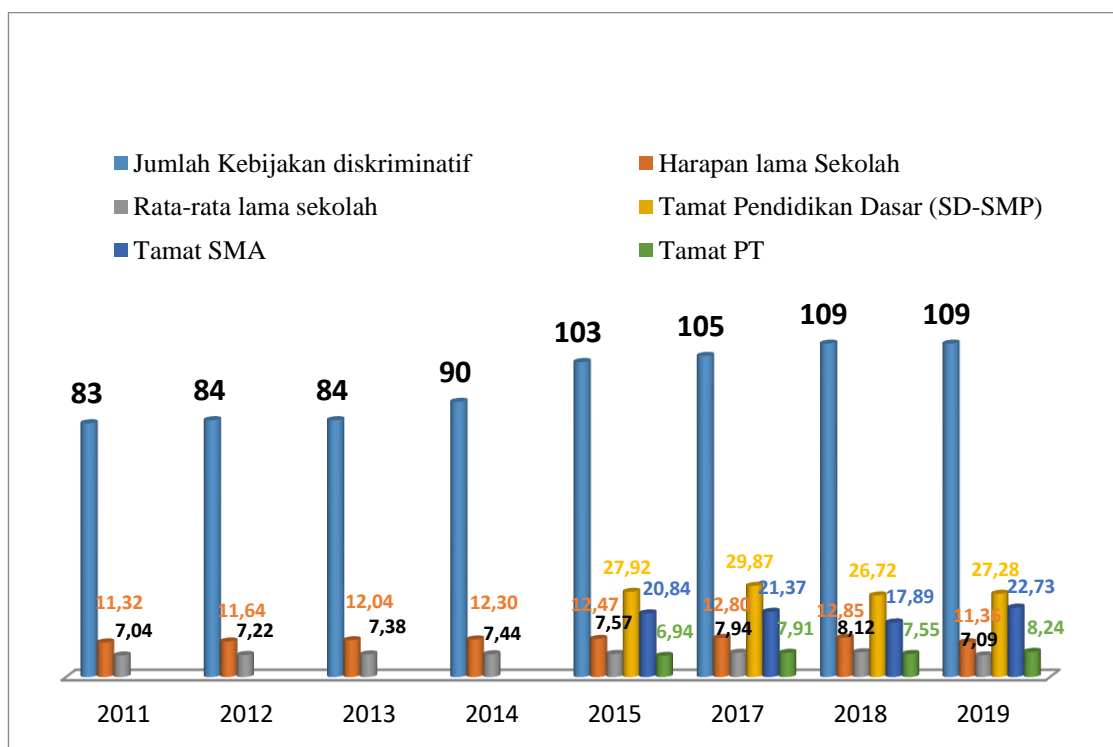
negeri mewajibkan seluruh anak perempuan untuk memakai jilbab. Beberapa siswi (anak perempuan) yang tidak berjilbab mengalami *bully* dari teman sekolahnya karena dianggap sebagai orang kafir dan akan masuk neraka. Tindakan *bully* tersebut menyebabkan siswi yang tidak berjilbab mengalami trauma dan memilih pindah sekolah. Hal ini tentunya menyebabkan anak perempuan berpotensi putus sekolah akibat penerapan dari Perda ini yang menimbulkan ujaran kebencian, intoleransi dan kekerasan di institusi pendidikan.

Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus terhadap pembatasan jam malam di kampus, untuk merespon banyaknya kasus kekerasan seksual dan maraknya seks tidak bertanggungjawab yang terjadi di lingkungan kampus berdampak terhadap menurunnya partisipasi mahasiswi dalam berorganisasi, memperoleh pengetahuan tambahan di luar jam kelas dan mencari tambahan penghasilan untuk menutupi biaya kuliah serta mengalami stigma sebagai perempuan malam sebagaimana yang dituturkan oleh salah satu responden dari hasil penelitiannya Jaringan Advokasi Jawa Barat (Simangunsong et al., 2018). Beberapa persoalan tentunya akan menghambat target pemerintah Indonesia dalam mencapai 4 hal dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender.

Pada tabel berikut ini menggambarkan bagaimana tren kebijakan diskriminatif dan tingkat pendidikan perempuan di Jawa barat. Dari hasil pengolahan data BPS dan pemantauan kebijakan diskriminatif dari tahun 2011-2019, ada kecenderungan memiliki korelasi antara tren bertambahnya jumlah

kebijakan diskriminatif dengan tingkat partisipasi perempuan di sektor pendidikan seperti yang tergambar pada tabel di bawah. Pada tahun 2018 seiring dengan bertambahnya jumlah kebijakan diskriminatif, partisipasi perempuan dalam tingkat pendidikan dasar (SD-SMP) menurun sekitar 3% dan pada tingkat pendidikan SMA menurun sekitar 4%, serta pada tahun 2019 juga terjadi penurunan Harapan Lama Sekolah sebesar 1,49 tahun dan rata-rata lama sekolah perempuan menurun sekitar 1,3 %. Namun dalam tabel juga tergambar dari tahun 2011-2012 meski kebijakan diskriminatif terjadi penambahan tetapi ada kecenderungan tingkat pendidikan perempuan juga cenderung meningkat. Hal ini memperlihatkan bahwa ada faktor lain yang memengaruhi tingkat pendidikan perempuan di Jawa Barat selain kebijakan diskriminatif.

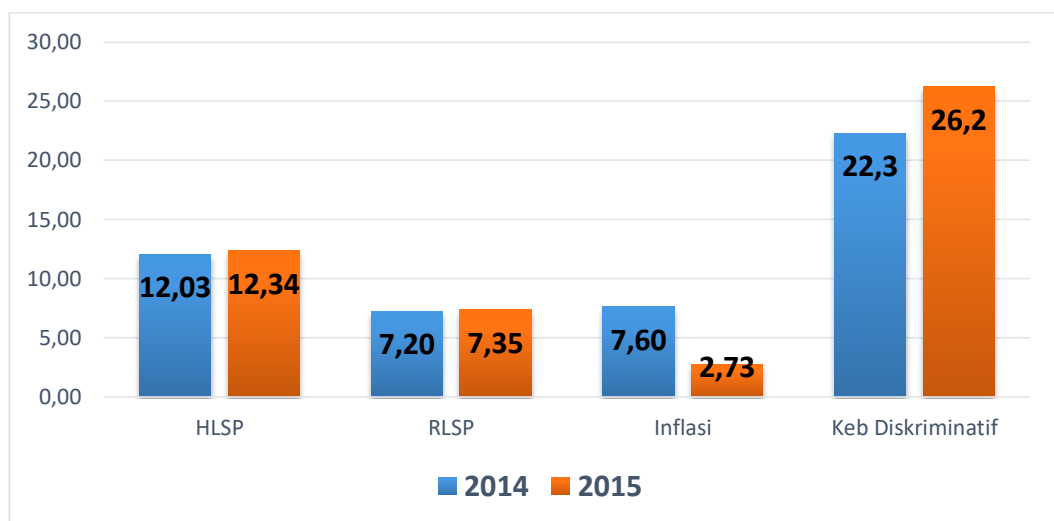
**Tabel 1. 2: Kebijakan Diskriminatif dan Tingkat Pendidikan Perempuan**



Sumber Data : Badan Pusat Statistik dan hasil pemantauan Komnas Perempuan

Sedangkan pada tabel di bawah ini menggambarkan bagaimana tren tingkat pendidikan perempuan, inflasi dan kebijakan diskriminatif di Jawa Barat pada tahun 2014-2015, di mana persentase kebijakan diskriminatif lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan dan inflasi. Tingkat pendidikan perempuan pada tabel di bawah diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

**Tabel 1. 3: Tingkat Pendidikan, Inflasi dan Kebijakan Diskriminatif Jawa Barat**



*Sumber data Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan beberapa argumentasi di atas, peneliti melihat perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk melihat dampak kondisi ekonomi dan kebijakan diskriminatif terhadap pendidikan perempuan pada rumah tangga miskin di Jawa Barat. Pemilihan Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi penelitian dilakukan karena Jawa Barat merupakan provinsi dengan angka kebijakan diskriminatif terbanyak di Indonesia, di mana dari 426 kebijakan diskriminatif sekitar 108 diproduksi oleh Pemerintah di Jawa Barat terutama dari kabupaten/kota.



### **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan maka fokus penelitian ini untuk melihat mana faktor yang paling memengaruhi antara kondisi ekonomi dan kebijakan diskriminatif terhadap pendidikan perempuan di Jawa Barat?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk membandingkan mana pengaruh yang paling signifikan antara kondisi ekonomi dan kebijakan diskriminatif terhadap pendidikan perempuan di Jawa Barat.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebaruan ilmu. Secara spesifik, kebaruan ini terletak pada belum banyaknya studi yang dilakukan untuk membandingkan pengaruh kondisi ekonomi dan kebijakan diskriminatif terhadap tingkat pendidikan perempuan.

### **1.6 Keterbatasan Penelitian**

Faktor-faktor yang diduga memengaruhi tingkat pendidikan perempuan di Jawa barat dalam berbagai studi literatur yang sudah disampaikan adalah faktor ekonomi dan kebijakan diskriminatif, sehingga hal ini berdampak pada bahwa penelitian ini akan memiliki keterbatasan karena hanya akan melihat faktor-faktor yang memengaruhi di mana variabelnya sudah ditentukan, yaitu variabel ekonomi dan kebijakan diskriminatif, sedangkan faktor-faktor lain yang memengaruhi

tingkat pendidikan perempuan di Jawa Barat tidak akan tergambar melalui penelitian ini.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan membandingkan mana pengaruh yang paling signifikan antara kondisi ekonomi dan kebijakan diskriminatif terhadap pendidikan perempuan pada rumah tangga miskin di Jawa Barat. Untuk itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas enam bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Studi Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Kondisi Objektif Lokasi Penelitian, Bab V Analisis dan Pembahasan, Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi.